

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepala Subbag Keuangan dan Perlengkapan



M. IKBAL TAHALUA., SH., M.Si

NIP.197708102003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran	x
Neraca	x
Laporan Operasional	x
Laporan Perubahan Ekuitas	x
Catatan atas Laporan Keuangan	x
Penjelasan Umum	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
Pengungkapan Penting Lainnya	x
Lampiran dan Daftar	x



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH MALUKU
Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18 Ambon 97115
Telepon.(0911) 352803 Faximile 352807

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang terdiri dari :Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internyang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 28 Januari 2022

Kepala Subbag Keuangan dan
Perlengkapan



M.IKBAL TAHALUA, SH., M.Si

NIP.19770810 200312 1 001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Semester II Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 765.000 mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada semester II TA 2021 adalah sebesar Rp.1.446.613.418 atau mencapai 88,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.641.640.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.1.446.613.418 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. Rp.1.446.613.418 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 765.000 dan sebesar Rp.0. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (1.445.848.418)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(1.445.848.418) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.445.848.418 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp.0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

CATATAN	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
B.1	-	-	#DIV/0!	-
	-	-	#DIV/0!	-
B.2.				
B.3	-	-	#DIV/0!	-
B.4	1.641.640.000	1.446.613.418	88,12	1.402.219.100
B.5	-	-	#DIV/0!	-
B.6	-	-	#DIV/0!	-
	1.641.640.000	1.446.613.418	88,12	1.402.219.100

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.445.848.418)	(1.402.219.100)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.445.848.418	1.402.219.100
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplemetasikan.
3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpercaya. Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

*Dasar
Pengukuran*

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap

semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka

Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

a. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan Rp.0

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	-	765.000	#DIV/0!
Jumlah	-	765.000	#DIV/0!

Realisasi Pendapatan Jasa semester II TA 2021 mengalami kenaikan 0 persen dibandingkan TA 2020 Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelayanan (jasa) akuntansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen yang berasal antara lain dari pendapatan

pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari tahun anggaran yang lalu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	765.000	-	#DIV/0!
Jumlah	765.000	-	#DIV/0!

Realisasi Belanja Negara Rp.1.446.613.418

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester II TA 2021 adalah sebesar Rp.1.446.613.418 atau 88,12% dari anggaran belanja sebesar Rp.1.641.640.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1.641.640.000	1.446.613.418	88,12
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	1.641.640.000	1.446.613.418	88,12
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	1.641.640.000	1.446.613.418	88,12

Dibandingkan dengan Semester II TA 2020, Realisasi Belanja semester II TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,17% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1.446.613.418	1.402.219.100	3,17
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Jumlah	1.446.613.418	1.402.219.100	3,17

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp.1.446.613.418

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.446.613.418 dan Rp.1.402.219.100. Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2021 mengalami Penurunan 3.17% dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	33.533.000	11.434.900	193,25
Belanja Barang Non Operasional	364.991.500	399.614.000	(8,66)
Belanja Jasa	108.878.000	385.146.000	(71,73)
Belanja Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	964.138.318	625.211.000	54,21
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.471.540.818	1.421.405.900	3,53
Pengembalian Belanja	24.927.400	19.186.800	
Jumlah Belanja	1.446.613.418	1.402.219.100	3,17

Belanja Modal
Rp.0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi tersebut pada TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan TA

2019. Hal ini disebabkan penambahan tanah yang akan digunakan sebagai sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp.0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA 2021	REALISASI TA 2020	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	0	0	#DIV/0!
Peralatan Komputer	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2021 Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Gedung Tempat Kerja	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi dalam rangka mendukung rencana strategis.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	Naik (Turun)
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk mendukung implementasi akuntansi pendapatan berbasis akrual.

Belanja Bantuan Sosial Rp.0.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Kelompok Pendidikan Jaya Maju	0	0	#DIV/0!
Kelompok Pendidikan Cenderawasih	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri KC Ambon Pattimura	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp.0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Semester II TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Uang Tunai	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas Rp.0.*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2021 dan 2020

Keterangan	TH 2021	TH 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

*Piutang
PNBP Rp.0.*

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB TA 2021 dan 2020

Uraian	TH 2021	TH 2020
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp.0.*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2020	TH 2019
1	0	-	-
2	-	0	0
	Jumlah	-	-

Bagian
Lancar TPA
Rp.0.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA Semester II TA 2021 dan 2020

No	Nama	TH 2021	TH 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Lancar
Rp.0

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar TA 2021 dan 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp.0.*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

*Pendapatan
yang Masih
Harus
Diterima
Rp.0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima semester II
TA 2021 dan 2020*

Jenis	TH 2021	TH 2020
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

*Persediaan
Rp.0*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2021 dan 2020

Jenis	TH 2021	TH 2020
Barang Konsumsi	-	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan
TP/TGR
Rp.0.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0 Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR TA 2021 dan 2020

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1	0	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	0	0
Jumlah		-	-

Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp.0.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA Semester II TA 2021 dan 2020

No	Debitur	TH 2021	TH 2020
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang
Rp.0.*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.(0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang TA 2020

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

*Tanah
Rp.0*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2021	0

*Peralatan
dan Mesin
Rp.0*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	0
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 desember 2020	0
Nilai Buku per 31 desember 2021	0

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Transfer Masuk peralatan kantor sebesar Rp0

*Gedung dan
Bangunan
Rp.0*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	
Mutasi tambah:	-
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	-
Nilai Buku per 31 Desember 2021	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Uang Muka
dari KPPN
Rp.0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang
kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
	-	
	-	
	-	
Total	-	

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.0.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
	-
	-
	-
Total	-

Beban yang Masih Harus Dibayar **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp.0.

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp.0. dan Rp.0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut. *Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Semester II TA 2021 dan TA 2020*

Uraian	TH 2020	TH 2021
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	-	-

Ekuitas **C.28 Ekuitas**

Ekuitas Rp.0

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan PNB Rp.0

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Lain-lain	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Pendapatan Lain-Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya yang berasal dari transaksi tahun 2020.

Beban Persediaan Rp.33.533.000

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 33.533.000 dan Rp11.434.900. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	33.533.000	11.434.900	193
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	0	#DIV/0!
Jumlah	33.533.000	11.434.900	193

*Beban Barang dan
Jasa
Rp.466.459.500*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.466.459.500 dan Rp. 770.510.00 Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2021 dan 2020

Beban Barang Operasional	395.881.500	701.624.000	(43,58)
Beban Langganan Daya dan Jasa			#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Profesi	33.090.000	41.300.000	(19,88)
Beban Jasa Lainnya	1.680.000	20.686.000	(91,88)
Beban Jasa Penanganan Pandemi covid-19	35.808.000	6.900.000	418,96
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	#DIV/0!
Jumlah	466.459.500	770.510.000	(39,46)

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp.946.620.918*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.946.620.918 dan Rp. 620.274.200. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	806.340.918	493.454.200	63,41
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.050.000	20.100.000	158,96
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.230.000	106.720.000	-17,33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
Jumlah	946.620.918	620.274.200	52,61

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp.0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II
TA 2021 dan 2020*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	-	#DIV/0!

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.(0)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.(0) dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II
TA 2021 dan 2020*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp.(0)*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	#DIV/0!
Penjualan Alat Kantor	0	0	#DIV/0!
Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	#DIV/0!

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

Pos Luar Biasa Rp.0

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Semester II TA 2021 dan 2020

URAIAN	TH 2021	TH 2020	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp.(1.446.613.418)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.(1.446.613.418) dan Rp.(1.402.219.100) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Rp0

Koreksi Nilai

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Persediaan Rp.0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Aset Tetap Rp.0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 .

Koreksi Aset Tetap

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Non Revaluasi Rp.0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini

berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Semester II Tahun 2021

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

*Koreksi Lain-Lain
Rp.0*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.1.445.848.418 dan Rp.1.402.219.100. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.445.848.418
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.445.848.418

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp.(0) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1.445.848.418

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0, terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin		
2	Persediaan		-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp (0,-)

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Semester II tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	Rp -
2	-	Barang	Rp -
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir Rp.0

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-Saldo pada rekening bendahara sebesar Rp. 0

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- **Laporan Kinerja Pada program Dipa AHU adalah sebagai berikut :**

1. Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.1.177.735.000 dan Realisasi sebesar Rp.999.443.500 mencapai 84.52%.

2. Layanan MKN, MPW dan MPD Notaris pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.632.265.000 dan Realisasi sebesar Rp.425.962.400 Mencapai 67.37%.

- **Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Anggaran Sewa Kendaraan adalah Sebagai Berikut:**

PPK terlambat menyampaikan/memberikan dokumen kontrak kepada bendahara Pengeluaran Pembantu, dan PPK menunggu mobil pengganti dari penyedia karena mobil yang datang speaknya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak sehingga dalam proses pencairan anggaran sewa kendaraan menjadi terhambat.

- **Pejabat Pengelola Keuangan**

Pejabat Pegelola Keuangan Kantor Wilayah Maluku Semester II Tahun 2020 sebagai berikut.

1. Kuasa Pengguna Anggaran (Drs. Andi Nurka.,SH.MH)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (Moksen Hasan)
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (Agung Rektono Seto,SH.MH.
4. Bendahara Pengeluaran (Maichel W. Huwae)
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (Sartika Chandra Devi)

pada Tahun 2021 tidak ada pergantian Pejabat di Kantor Wilayah Maluku

- **Daftar Pengguna Kendaraan Operasional**

No	Nomor Kendaraan	Nama Pengguna	Jabatan Pengguna	Keterangan
1	DE. 1344 AN	MAX WAMBRAU	Kadiv Yankum	Sewa
2	DE 1940 AN	MEZAK A. BATLAJERY,SH.MH	Kabag P2L	Sewa
3	DE 1941 AN	LA MARGONO,SH.MH	Kabid Yankum	Sewa
4	DE 1942 AN	Rapin,SH,MH	Kasubid. Yankum	Sewa

- Terdapat Konsep Temuan BPK pada Divisi Yankum - AHU KANWIL MALUKU, konsep temuan BPK dengan surat Nomor: 10/PDPTT-AHU/08/2018 perihal Penyampaian Konsep TP dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kanwil Kemenkumham Maluku belum mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan operasional kepada CV. Menara Abadi sebesar **Rp 12.745.317,00**

2. Pembayaran Honorarium Belum diberikan kepada 9 (orang) penerima sebesar Rp **27.805.000,00** dan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 560.000,00 serta belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap.

3. Realisasi Belanja Perjadin pegawai pada Kanwil Kemenkumham Maluku tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp. 25.918.103,00**

- Tindak Lanjut Terhadap Konsep Temuan BPK :

1. Atas keterlambatan pelaksanaan pengadaan Sewa kendaraan operasional CV. Menara Abadi telah melakukan penyeteroran melalui pemotongan pembayaran Termin II dengan nomor SPM. 00084 tanggal 08 Oktober 2018 dengan No. SP2D: 180611302009822 tanggal 10 Oktober 2018 senilai **Rp.12.745.317,00**

2. Terhadap Pembayaran Honorarium Sebesar **Rp. 27.805.000,00** telah diberikan kepada 9 (orang) dan di kembalikan ke kas Negara sebesar Rp. 17.490.000,-dan kelebihan Honor kegiatan sebesar **Rp.560.000,00** telah disetor ke kas Negara (bukti terlampir)

Temuan Belanja Perjadin pegawai pada Kanwil Kemenkumham Maluku Tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp.25.918.103,00** belum ada tindak lanjut

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Kantor Wilayah Maluku
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-12-2017	Tahun 2018	Per 30-06-2018	Per 30-06-2018
A	Tanah						
1	Tanah	-	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	0	0	-	-	-	-
2	Alat Kantor	0	0	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	0	0	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	0	0	-	-	-	-
5	Komputer Unit	0	0	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	0	0	-	-	-	-
	Alat Bantu	0	0	-	-	-	-
	Alat Ukur	0	0	-	-	-	-
	Alat Studio	0	0	-	-	-	-
	Senjata Api	0	0	-	-	-	-
7	Alat Khusus Kepolisian	0	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
D	Jaringan						
1	Jaringan Air Bersih / Air Baku	0	0	-	-	-	-
2	Jaringan Telepon	0	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
E	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	-	-	-	-
2	Alat Bercorak Kebudayaan	0	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	0	0	-	-	-	-
2	Alat Rumah Tangga	0	0	-	-	-	-
3	Alat Komunikasi	0	0	-	-	-	-
4	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	0	0	-	-	-	-
5	Komputer Unit	0	0	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	0	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
	Total		-	-	-	-	-

Lampiran II: Daftar Hibah Langsung Berupa Uang/Barang/Jasa

KANTOR WILAYAH MALUKU
 DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG/BARANG/JASA
 PER 31 Desember 2017

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	-	Uang	DN	Rp -		Rp -	-
		Barang	DN	Rp -	Rp -		
2	-	Uang	LN	Rp -	Rp -		
3	-	Barang	DN	Rp -		Rp -	-
Jumlah				Rp -	Rp -	Rp -	-